

Aplikasi Pikobar Solusi Digital Andalan Bagi Jawa Barat Untuk Covid-19

¹Siti Alia, ²Ega Ratnasari

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; aliaalya267@uinsgd.ac.id

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; egaratnasari310@gmail.com

Abstract

The regional government is one of the organizers of government affairs based on the principle of autonomy, therefore in this case the West Java provincial government makes an innovation in the context of controlling and handling COVID-19. The West Java Provincial Government has issued an innovation in efforts to control and handle COVID-19 cases, namely through an innovation in the PIKOBAR application (West Java Province COVID-19 Information and Coordination Center). This study aims to see to what extent the PIKOBAR application can become a reliable digital solution in West Java in efforts to control and handle COVID-19. And to find out how the data flow from this PIKOBAR application. In this study using a qualitative approach with literature study analysis techniques. Data collection techniques are carried out by studying various sources of data obtained from electronic mass media, books, journals, related to research as secondary data that previously existed before the research was carried out. From the results of this analysis, it can be concluded that the PIKOBAR application is one of the digital-based innovations that is superior in West Java because PIKOBAR has provided various uses and benefits for the people of West Java during the COVID-19 pandemic. Regencies/cities develop PIKOBAR reporting applications in their respective districts/cities. Reporting data announced by the spokesman, namely before 12 o'clock on the same day, the provincial data team prepared data on recovered and died cases sourced from the PIKOBAR data application.

Keywords: E-Government, PIKOBAR, West Java, COVID-19

Pendahuluan

COVID-19 merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Tiongkok, tepatnya yaitu di Kota Wuhan yang sudah berkembang ke seluruh negara di dunia, dan salah satunya yaitu negara Indonesia. Sejak ditemukannya kasus COVID-19 di Indonesia oleh warga Kota Depok, Jawa Barat. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia harus membuat sebuah kebijakan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini secara tepat. Pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan banyak ketakutan dan kekhawatiran banyak orang karena banyaknya kasus positif hingga kasus meninggal di Indonesia. Sehingga, pemerintah harus mampu memberikan sebuah perlindungan kepada warga negaranya dalam upaya pencegahan ataupun penanganan pandemi COVID-19 yang sesuai dengan amanat dalam UUD 1945.

Banyak berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya pengendalian dan penanganan pandemi COVID-19 tersebut dilanjutkan juga oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dan salah satunya yaitu pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah dimana orang pertama yang terinfeksi oleh virus corona ditemukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian memberlakukan status siaga serta membuat sebuah inovasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat (PIKOBAR). Jabar Command Center yang berada di Gedung Sate merupakan pusat dari pengelolaan aplikasi PIKOBAR.

PIKOBAR merupakan salah satu *e-government* yang dibuat oleh pemerintah. *E-government* adalah pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan atau tugasnya baik itu dalam hal mengelola pemerintahan maupun dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Secara umum maka

penerapan *e-government* memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas serta efisiensi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan terhadap masyarakat yang lebih baik dan berkualitas. (Marudur Padapotan Danamik . Erisva Hakiki Purwaningsi, 2017)

Aplikasi PIKOBAR termasuk model *e-government* G2C (*Government to Citizens*) merupakan sebuah model *e-government* yang umum digunakan oleh pemerintah karena pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan tujuan utamanya memperbaiki hubungan interaksi serta komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Intinya bahwa tujuan utama digunakannya sebuah aplikasi *e-government* model G2C yaitu untuk menajalin hubungan anantara pemerintah dengan masyarakat sehingga menjadi lebih dekat dengan melalui berbagai kanal akses supaya masyarakat dengan mudah dapat menjangkau pemerintah untuk berbagai kebutuhan pelayanan. (Xing & Isaacowitz, 2006)

Menurut Mahmudi (2010) (dalam buku Sellang 2006) pelayanan publik merupakan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh seseorang yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi berbagai keinginan serta kebutuhan publik dan hal tersebut dilaksanakan atas dasar ketentuan peraturan berdasarkan landasan hukum. Aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bertanggungjawab untuk selalu memberikan pelayanan yang baik serta berkualitas terhadap masyarakat atau warga negaranya supaya dapat menciptakan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat sudah memberikan dananya yang berupa pembayaran pajak, kemudian pungutan retribusi, dan berbagai pungutan pembayaran lainnya, maka dari itu masyarakat berhak mendapat pelayanan yang baik serta berkualitas dari pemerintah. Akan tetapi, walaupun dalam melakukan pelayanan publik itu ada pada tangan pemerintah, namun pelayanan publik dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga maupun pihak swasta, contohnya seperti organisasi nonprofit, kemudian relawan, lembaga swadaya masyarakat dan yang lainnya. Apabila dalam suatu pelaksanaan pelayanan publik tertentu pemerintah menyerahkan kepada pihak ketiga atau pihak swasta, maka pemerintah harus memberikan ketentuan peraturan, keamanan, jaminan atau pertanggungjawaban, kepastian hukum, serta lingkungan yang kondusif. (Dan et al., 2019)

Aplikasi PIKOBAR tersebut terus di kelola dan di kembangkan dengan berbagai fitur layanan di dalamnya, diantaranya yaitu mengenai peta penyebaran yang terjangkit COVID-19, kemudian terdapat fitur mengenai rumah sakit yang mencakup data serta informasi, hingga terdapat fitur layanan bansos untuk warga yang terdampak adanya wabah COVID-19 ini. Adanya aplikasi PIKOBAR merupakan inovasi yang di rancang serta dibuat oleh Pemprov Jawa Barat sebagai penunjang dalam penanganan COVID-19 khususnya di daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Di Jawa Barat” penelitian ini menjelaskan tentang inovasi kebijakan publik mengenai pencegahan serta penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat dan juga adanya pembahasan terkait dengan penerapan kebijakan publik yang berbasis inovatif di daerah provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian tersebut bahwa kebijakan pada saat ini masih bersifat normal mulai dari penanganan penyebaran kasus COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan yaitu adanya sebuah konsep baru dari inovasi kebijakan publik yang bersifat implementatif yaitu dengan dibuatnya aplikasi PIKOBAR oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, sehingga harapannya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan kongkrit serta dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih berkesinambungan. (Anggara et al., 2020).

Lalu dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Prinsip *Agile Governance* Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat” dalam penelitian tersebut membahas mengenai implementasi 3 prinsip *agile governance* pada saat pandemi COVID-19 oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan melalui aplikasi PIKOBAR. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi *agile governance* pada pemerintah provinsi Jawa Barat masih belum maksimal, karena aplikasi PIKOBAR masih perlu diperbaiki. (Halim et al., 2021)

Dalam penelitian terdahulu lainnya yang berjudul “Inovasi Layanan Publik Pusat Informasi dan Koordinasi Jawa Barat (PIKOBAR) Saat Pandemi COVID-19” penelitian tersebut membahas tentang bagaimana inovasi pelayanan publik terkait pencegahan serta penanganan COVID-19 yang berbasis inovatif di provinsi Jawa Barat melalui aplikasi PIKOBAR. Dan hasil dari penelitian tersebut pelayanan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, karena dengan adanya aplikasi PIKOBAR tersebut prosedur pelayanan menjadi lebih sederhana. (Syaidah, 2020)

Dari beberapa penjelasan penelitian terdahulu di atas, terkait dengan aplikasi PIKOBAR belum terdapat yang meneliti mengenai bagaimana aplikasi PIKOBAR dapat menjadi sebuah inovasi digital yang di unggulkan atau di andalkan di Jawa Barat dalam upaya pengendalian COVID-19 serta pembahasan terkait dengan alur data dari aplikasi PIKOBAR tersebut. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis akan mengkaji sejauhmana aplikasi PIKOBAR tersebut dapat menjadi sebuah solusi digital andalan di Jawa Barat dalam upaya pengendalian dan penanggulangan pandemi COVID-19. Dan bagaimanakah alur data dari aplikasi PIKOBAR ini. Sehingga, berdasarkan dari hasil analisis tersebut diharapkan mampu mengupas permasalahan aplikasi PIKOBAR tersebut, serta faktor mana yang akan menjadi pendorong atau penghambat bagi aplikasi PIKOBAR tersebut, dengan begitu diharapkan mampu menjadi sebuah masukan dan saran untuk para pemangku kebijakan sebagai bahan untuk memperbaiki aplikasi PIKOBAR tersebut dalam upaya pengendalian dan penanggulangan wabah pandemi COVID-19 supaya kedepannya dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Metode Penelitian

Metode penelitian (Anggara, 2015) adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan untuk memperoleh berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan menurut (Silalahi, 2015) metode penelitian merupakan suatu proses yang sistematis dan terencana untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi serta untuk mendapatkan data dan informasi terkait dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literatur. Pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2017) merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data secara lebih mendalam yang mengandung suatu makna. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber data yang diperoleh dari media massa elektronik, buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan penelitian sebagai data sekunder yang sebelumnya sudah ada sebelum dilakukannya penelitian. (Silalahi, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Telah ditemukan sebuah kasus radang paru-paru yang disebabkan oleh Virus Corona, yaitu virus yang belum pernah diketahui sebelumnya, sehingga virus tersebut disebut dengan sebutan Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus* yang pertama kali ditemukan di daerah Kota Wuhan, Tiongkok. Secara resmi WHO mengumumkan mengenai penamaan baru virus tersebut yaitu pada tanggal 11 Februari 2020 dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* atau disebut juga dengan sebutan SARS-CoV-2 dan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan sebutan penyakit yang ditimbulkan oleh SARS-CoV-2 tersebut. Bahkan WHO telah memberikan pengumuman bahwa wabah COVID-19 ini merupakan pandemi yang bersifat global, karena COVID-19 sudah berkembang dan menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk salah satunya yaitu negara Indonesia. (Pane et al., 2018)

Sebuah inovasi dibuat oleh pemprov Jawa Barat sebagai upaya untuk pengendalian serta penanganan kasus COVID-19 khususnya di daerah provinsi Jawa Barat yaitu dengan dibuatnya aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) yang dikelola oleh jabar digital service atau disebut sebagai diskominfo yang bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk konten data. Aplikasi PIKOBAR tersebut berisi tentang pelaporan data mengenai COVID-19 yang dilakukan oleh kabupaten/kota; kemudian aplikasi PIKOBAR juga berisi update data mengenai orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, Orang Dalam Pemantauan, dan Pasien Dalam Pengawasan di provinsi Jabar; serta data positif yang ada di PIKOBAR menyesuaikan dengan data yang diumumkan oleh jubar kemkes. (Barat, 2020)

Aplikasi PIKOBAR adalah bagian dari inovasi digital yang dikeluarkan oleh pemprov Jawa Barat, dan aplikasi PIKOBAR ini di unggulkan di Jawa Barat karena aplikasi PIKOBAR tersebut telah memberikan berbagai kegunaan dan juga manfaat bagi masyarakat di Jawa Barat saat dalam keadaan pandemi COVID-19 pada saat ini. Informasi mengenai COVID-19 dapat diakses dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat digital. Aplikasi PIKOBAR terus dikelola serta dikembangkan melalui berbagai fitur layanan lainnya. Salah satunya yaitu data terkait informasi supaya masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah karena terdampak oleh adanya COVID-19 dengan menggunakan sebuah fitur Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial atau disebut dengan SOLIDARITAS yang terdapat dalam aplikasi PIKOBAR. Selain itu, dengan aplikasi PIKOBAR masyarakat Jawa Barat dapat melakukan pemeriksaan atau diagnosa secara mandiri melalui sebuah fitur yang bernama Periksa Mandiri contohnya seperti gejala-gejala yang dialaminya, bahkan dalam aplikasi PIKOBAR tersedia fitur menjadi seorang relawan untuk membantu penanganan kasus COVID-19 yaitu dengan mengakses fitur Daftar Relawan.

Aplikasi PIKOBAR dapat di *download* melalui *smartphone*, sehingga semua orang dapat dengan mudah mengaksesnya. Aplikasi tersebut menjadi salah satu referensi utama untuk mengetahui mengenai data serta informasi terkait COVID-19 untuk warga Jawa Barat. Sehingga tidak terjadi berita yang tidak jelas kebenarannya terkait data dan juga informasi mengenai COVID-19. Maka warga Jawa Barat dapat mencari berbagai informasi terkait COVID-19 dalam aplikasi PIKOBAR ini secara satu pintu. Aplikasi PIKOBAR merupakan salah satu dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah serta pihak terkait di Jawa Barat supaya dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam upaya penanganan penyebaran ataupun pencegahan COVID-19 di Indonesia sehingga dapat segera diatasi.

Inovasi Kebijakan

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) dalam (Setijaningrum, 2016) inovasi adalah suatu ide-ide yang baru atau berbagai objek baru yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Berdasarkan proses penerapannya, inovasi kebijakan lebih menekankan untuk meningkatkan aspek kualitas dari suatu prosedur kerja baik itu secara internal maupun eksternal, untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh stakeholder. Prosedur kerja organisasi publik yang biasanya cenderung lambat, lalu rumit serta berbelit-belit maka hal tersebut harus diubah menjadi mekanisme kerja yang lebih baik yaitu cepat, akurat dan juga produktif. Tujuan dari inovasi kebijakan yang berdasarkan proses diharapkan masyarakat bisa mendapatkan sebuah hal baru dalam hal pelayanan yang sesuai dengan kriteria pelayanan yang baik.

Salah satu contoh dari penerapan inovasi kebijakan proses yaitu Pemprov Jawa Barat mengeluarkan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi informasi internet untuk memberikan sebuah informasi yaitu berupa data serta tampilan visual terkait penyebaran kasus COVID-19, dalam rangka pengendalian dan penanganan kasus COVID-19 untuk masyarakat Jawa Barat yaitu Pusat Koordinasi dan Informasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar).

Aplikasi PIKOBAR merupakan salah satu terobosan dari Pemprov Jawa Barat yang berusaha menyederhanakan proses birokrasi yang apabila dikerjakan secara manual alur prosedurnya dapat berjalan dengan panjang, dan masyarakat yang sebelumnya kurang mengerti mengenai informasi terkait COVID-19, maka dengan adanya aplikasi PIKOBAR ini sekarang masyarakat bisa dengan mudah memperoleh berbagai informasi. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang unggul dalam hal menyediakan informasi ter-update dengan adanya aplikasi PIKOBAR.

Dengan adanya inovasi yang di buat oleh Pemprov Jawa Barat yaitu aplikasi PIKOBAR maka diharapkan dapat meningkatkan informasi untuk masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan masyarakat lebih waspada dalam rangka percepatan penanganan kasus wabah COVID-19 khususnya di daerah Jawa Barat. Sehingga, wabah COVID-19 di Jawa Barat dapat segera diatasi.

Sebuah inovasi kebijakan publik dikeluarkan karena sebagai pemenuh kepentingan masyarakat, bukan karena untuk kepentingan dari sektor privat ataupun kelompok, apabila kebijakan publik dalam penerapannya berdasarkan nilai-nilai normatif standar kebijakan maka akan bermanfaat. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pemerintah pusat untuk percepatan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia, sudah mencapai sebuah inovasi kebijakan berdasarkan pada proses secara bagus yaitu dengan cara meningkatkan sebuah sistem digital yang disebut dengan aplikasi PIKOBAR.

Inovasi PIKOBAR

Secara bahasa inovasi merupakan sebuah ide-ide atau sesuatu yang dapat dihasilkan dari suatu proses, sedangkan pada kenyataannya inovasi itu mencakup sebuah prosedur dan hasil. Pada umumnya inovasi dapat bersifat modern, positif, suatu perubahan, dan suatu hal yang baru. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa inovasi merupakan sebuah perubahan yang bertahap termasuk juga adaptasi dari sebuah inovasi tersebut ditempat lain butuh dalam jangka waktu tertentu. Adapun West & Farr mengatakan bahwa inovasi sebagai penerapan yang berupa gagasan, kemudian proses dan juga prosedur baru dalam rangka memberikan berbagai manfaat bagi individu, organisasi, kelompok dan juga masyarakat.

Maka berdasarkan penjelasan sebelumnya, apabila dihubungkan dengan kebijakan inovasi pelayanan publik dapat dikatakan yaitu sebuah pergeseran arti atau makna, prosedur, prinsip, mekanisme dan bentuk pelayanan publik diubah dari yang bersifat sudah lama ke suatu hal yang bersifat baru serta inovasi pelayanan publik dirancang untuk memberikan berbagai manfaat serta keuntungan bagi masyarakat (publik). (Nurdin, 2019)

Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan sebuah hal yang bisa membuat publik memberikan kepercayaan. Dengan kata lain bahwa berinovasi dapat membuat adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah serta dapat membuat adanya daya saing suatu bangsa dengan menggunakan sebuah pendekatan yang lebih baru dalam menyelesaikan suatu masalah, atau desain kebijakan yang khas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan dan perubahan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan keputusan Menteri PANRB nomor 246 tahun 2020 tentang Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19, aplikasi PIKOBAR memasuki top 21 kategori tersebut. Bapak Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat mengatakan, bahwa aplikasi PIKOBAR adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh pemprov Jawa Barat sebagai pendukung untuk upaya pengendalian dan penanganan kasus COVID-19 khususnya di daerah provinsi Jawa Barat. Dan semua informasi yang terkait dengan pengendalian COVID-19 terdapat dalam satu platform. (<https://menpan.go.id/>)

Beberapa kriteria indikator dalam penilaian menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) ada empat kriteria, diantaranya yaitu dari segi manfaatnya, efektifnya, suatu hal yang baru atau kebaruan dan dapat ditiru atau diterapkan kembali. *Open source* atau perangkat lunak sumber terbuka diterapkan dalam aplikasi PIKOBAR, sehingga dapat dengan mudah apabila aplikasi PIKOBAR tersebut dapat diterapkan di wilayah lain. Jadi, pemerintah daerah lainnya tidak harus mengeluarkan aplikasi yang serupa.

Banyak yang sudah mendownload aplikasi PIKOBAR, yaitu lebih dari 1 juta orang yang menggunakan. Dan hal tersebut menunjukkan aplikasi PIKOBAR sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas sebagai salah satu sumber informasi terkait dengan COVID-19 di Jawa Barat. Fitur dari aplikasi PIKOBAR yang sering digunakan oleh masyarakat diantaranya fitur data informasi terkait COVID-19 baik dalam lingkup di Jawa Barat, nasional, maupun dunia, kemudian fitur penyebaran kasus COVID-19, periksa mandiri, serta dalam aplikasi PIKOBAR juga terdapat fitur anti *hoax* atau berita yang tidak benar.

Kepala Diskominfo yaitu Bapak Setiaji menyatakan bahwa, hal terpenting bukan mendapatkan penghargaan. Tetapi, penghargaan tersebut bisa membuktikan dan menggambarkan bahwa aplikasi PIKOBAR mempunyai berbagai kegunaan yang dapat dinikmati serta digunakan secara langsung oleh masyarakat luas terutama dalam hal kasus COVID-19.

Alur Data COVID-19 Provinsi Jawa Barat

Alur pelaporan data secara manual yaitu, Kabupaten/Kota melaporkan data agregat Pasien Dalam Pengawasan, Orang Dalam Pemantauan, Orang Tanpa Gejala dan Pasien Positif melalui WA grup surveilans; Kabupaten/Kota melaporkan sebelum jam 15.00 sore; data akan dipooling dan diumumkan di PIKOBAR jam 16.00; data yang masuk setelah jam 16.00 akan dimasukkan ke dalam laporan esok hari; data kesembuhan dan meninggal di laporkan oleh kabupaten/kota ke dinkes provinsi dan di laporkan ke pusat by name by adress sebelum jam 12.00. Untuk di umumkan oleh jubar nasional.

Pelaporan data yang diumumkan oleh jubiir yaitu sebelum jam 12 pada hari yang sama, tim data provinsi menyiapkan data kasus sembuh dan meninggal yang bersumber dari aplikasi data PIKOBAR, data manual dari kabupaten/kota serta data lainnya ke pheoc. (Barat, 2020).

- Pengajuan data kasus konfirmasi:
 - Sembuh
 - Meninggal
 - Luar wilayah
 - Dobel
 - Klarifikasi Kasus
 - Pengajuan Kasus Positif
- Penerimaan dan Pengelolaan Data oleh PHEOC.
- Pengumuman oleh Jubiir Kemkes.

Dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19 di kabupaten/kota diantaranya yaitu dengan mengembangkan aplikasi pelaporan PIKOBAR di masing-masing kabupaten/kota.

Isu / permasalahan (pusat dan provinsi)

- a. waktu ketika hasil lab keluar dengan laporan data yang terkonfirmasi positif di juru bicara kemkes masih sering terjadi delay, sehingga data antara kab/kota dengan provinsi/pusat mengalami perbedaan;
- b. dalam dashboard all new record masih sulit untuk mendapatkan data karena masih tercampur oleh data yang berada di daerah lain;
- c. belum terintegrasinya aplikasi antar level pemerintahan;
- d. belum adanya koherensi antara data dari surveilans provinsi dengan data rumah sakit untuk monitoring kasus sembuh dan meninggal sehingga terjadi keterlambatan pelaporan angka sembuh dan meninggal.

Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat, mengakui bahwa masalah dalam pelaporan data tidak hanya dialami oleh Jawa Barat saja, akan tetapi hal tersebut juga dialami oleh berbagai daerah lain seperti Jawa Tengah. Karena kadang data yang disajikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan di daerah berbeda, seperti dalam hal peningkatan pasien baru yang terkonfirmasi positif COVID-19 ataupun akumulasi pasien yang terkonfirmasi positif yang dirawat atau yang menjalankan isolasi.

Suatu hal yang melatar belakangi terjadinya beda akumulasi data karena adanya delay waktu hasil lab yang keluar dengan laporan data yang terkonfirmasi positif di jubiir kemkes, sehingga data antara kab/kota dengan provinsi ataupun pusat berbeda. Contohnya yaitu pada akumulasi data pasien yang terkena COVID-19 di Jawa Barat pada aplikasi PIKOBAR, berbeda dengan akumulasi data pasien yang aktif pada Pusicov Kota Bandung.

Pada tanggal 4 Desember 2020, data pasien pada aplikasi PIKOBAR yang terkonfirmasi positif di Kota Bandung yaitu dengan jumlah 1.137, sedangkan data dalam Pusicov yaitu berjumlah 641 pasien yang terkonfirmasi positif. Maka, dapat dilihat bahwa ada perbedaan selisih orang yang terkonfirmasi aktif COVID-19 yaitu sekitar 500 orang. Dan juga dengan selisih akumulasi dari kasus yang terkonfirmasi, pada aplikasi PIKOBAR menyajikan data dengan 4.526 yang terkonfirmasi di Kota Bandung, sedangkan pada

Pusicov menyajikan data 3.942 orang yang terkonfirmasi positif. Maka selisih antara jumlah total dari kasus terkonfirmasi dalam aplikasi PIKOBAR dan Pusicov itu hampir 600 kasus. (<https://news.detik.com/>).

Dapat dilihat bahwa alur data yang terkonfirmasi positif COVID-19 di provinsi menyamakan dengan data yang dilaporkan oleh Jubir Kemenkes. Dan sedangkan, kab/kota melakukan input data tambahan yang langsung ke Kemenkes dengan menggunakan aplikasi All New Record.

Tetapi, masih terdapat beberapa hambatan ketika dalam melaksanakan laporan melalui All New Record ini, walaupun nyaris semua fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai akun untuk melapor secara langsung ke aplikasi tersebut. Beberapa kendala tersebut diantaranya yaitu fasilitas kesehatan masih belum maksimal dalam mengisi pelaporan tersebut, kemudian kesulitan dalam mengaksesnya, terjadi hilangnya data, sulit untuk input data, datanya kurang lengkap, sulit dalam mengambil data, dan sebagainya.

Berli Hamdani sebagai kepala Dinkes menjelaskan bahwa dalam laporan kasus COVID-19 belum berjalan secara dengan maksimal, akan tetapi sistem ini diharapkan dapat diperbaiki dan tingkatkan kembali.

Simpulan

Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau disingkat menjadi PIKOBAR merupakan inovasi digital yang menjadi unggulan di Jawa Barat. Aplikasi tersebut memberikan berbagai kegunaan serta kebermanfaatannya untuk masyarakat Jawa Barat terutama pada saat adanya situasi pandemi COVID-19 ini. Informasi serta data mengenai kasus COVID-19 dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat digital. Dan aplikasi PIKOBAR juga terus ditingkatkan ke berbagai pelayanan. Salah satunya yaitu terkait data informasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui mengenai bansos yang diberikan oleh pemerintah karena terdampak adanya COVID-19 ini dengan melalui sebuah fitur Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial dalam aplikasi PIKOBAR. Kabupaten/kota mengembangkan aplikasi pelaporan PIKOBAR pada masing-masing kabupaten/kota. Pelaporan data yang diumumkan oleh jubir yaitu sebelum jam 12 pada hari yang sama, tim data provinsi menyiapkan data kasus sembuh dan meninggal yang bersumber dari aplikasi data PIKOBAR, data manual dari kabupaten/kota serta data lainnya ke phec. Suatu hal yang melatar belakangi terjadinya beda akumulasi data karena adanya delay waktu hasil lab yang keluar dengan laporan data yang terkonfirmasi positif di jubir kemkes, sehingga data antara kab/kota dengan provinsi ataupun pusat berbeda. Untuk solusi kedepannya, diharapkan PIKOBAR dapat mempunyai data publik secara luas dengan berdasarkan pelaporan terbaru dari jubir nasional dan juga berdasarkan data real time positif dari kabupaten/kota untuk konsumsi pengambil kebijakan, informasi di all new record agar lebih mudah ditarik, dan adanya aplikasi yang terintegrasi dengan semua lintas sektor.

Referensi

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani (ed.); Pertama). CV Pustaka Setia.
- Anggara, S., Afyah, S., Farida, A. S., & Muslim, J. (2020). Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130–139.

- Barat, D. K. J. (2020). Alur Data Covid-19 Provinsi Jawa Barat.
- Dan, A., Publik, P., & Teori, A. (2019). Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya. February.
- Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 48–67.
- Marudur Padapotan Danamik . Erisva Hakiki Purwaningsi. (2017). E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21, 1–27.
- Menpanrb. (2020). Kementerian PANRB Umumkan Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19. Available from: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan-top-21-inovasi-pelayanan-publik-penanganan-covid-19>
- Nurdin, I. (2019). PUBLIK.
- News detik. (2020). Lika-liku Pelaporan Data COVID-19 di Jawa Barat. Available from: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5282131/lika-liku-pelaporan-data-covid-19-di-jawa-barat>
- Pane, D. N., Fikri, M. EL, & Ritonga, H. M. (2018). Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19). In *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Setijanigrum, E. (2016). Inovasi Kebijakan dan Pelayanan Publik Best Practice di Indonesia. *Airlangga University Press*, 1–147.
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* (N. F. Atif (ed.); Empat). PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaidah, S. (2020). Inovasi Layanan Publik Pusat Informasi Dan Koordinasi Jawa Barat (Pikobar) Saat Pandemi Covid-19. *Dialektika*, 7(2), 148–158. <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialektika/article/view/1730>
- Xing, C., & Isaacowitz, D. M. (2006). Analisis Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapantan Provinsi Riau Di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan. *Motivation and Emotion*, 30(3), 243–250.